ABSTRAK

Migrasi illegal dilakukan oleh 43 warga Papua yang menggunakan perahu untuk berlayar ke Australia. Mereka teridiri dari 30 orang laki-laki, 6 perempuan dan 7 anak-anak yang berkewarganegaraan Indonesia dan berasal dari Papua. Mereka bertolak dari Merauke, dan berlayar selama lima hari dan akhirnya mendarat di tepi pantai terpencil Cape York Australia timur laut. Tujuan pelayaran tersebut adalah untuk mendapatkan perlindungan atau yang lazim disebut sebagai suaka dari Pemerintah Australia dengan alasan yang diajukan adalah hilangnya rasa aman, ketika memadamkan gerakan separatis, militer Indonesia melakukan aksi genosida di Papua. Kondisi ini lah yang kemudian membuat hubungan Indonesia-Australia kian memanas. Dalam jajak pendapat di sidang paripurna DPR menilai Australia telah melecehkan Indonesia di mata Internasional. Pemerintah diminta untuk tidak percaya dengan standar ganda Australia.

Sebagai acuan terhadap masalah penelitian dikemukakan teori-teori dan kajian dari pakar atau ahli dalam bentuk premis mayor, antara lain : Politik internasional, hukum internasional dan politik luar negeri. Dan premis minornya, antara lain : Hubungan Bilateral RI – Australia, Kedaulatan Indonesia, dan Intervensi Australia. sehingga langsung menyentuh pada pokok-pokok permasalahan.

Penulis menarik hipotesis : **“Sikap Indonesia untuk menangkal segala bentuk intervensi Australia atas Papua diwujudkan melalui penyampaian nota protes RI ke Australia melalui Kemenlu, penarikan Duta Besar Indonesia di Australia, penghentian kerjasama militer RI – Australia, dan penundaan kunjungan Presiden Jokowi ke Australia, dengan demikian Australia tidak dapat lagi mengintervensi kedaulatan Negara Republik Indonesia, karena NKRI adalah harga mati dan New York Agreement adalah bukti kedaulatan RI atas Papua”.**

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode penelitian ditarik kesimpulan bahwa posisi Australia terhadap Papua sangat penting karena Australia mempunyai pengaruh politik di kalangan negara-negara Pasifik Selatan, yang berdampak luas atas kasus politis terbesar dalam sejarah hubungan Indonesia - Australia adalah kasus pemberian suaka izin tinggal sementara kepada 42 warga Papua pada tahun 2006. Kasus pemberian suaka kepada warga imigran Papua, akhirnya menimbulkan berbagai problematika transnasional yang kompleks yang ditengarai oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk upaya dalam mendukung dan meningkatkan eksistensi terkait isu separatisme.

***Kata kunci : Sikap politik Indonesia atas intervensi Australia di Papua***